

Kondisi Sosial Politik Banyumas Sekitar Peristiwa 1 Oktober 1965 (1963-1966)

DIKI KRISTIYADI DAN AMAN

Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY
aman@uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini difokuskan terhadap kondisi sosial kemasyarakatan yang mencakup kebudayaan dan kondisi politik yang mencakup organisasi politik beserta aktivitasnya pada tahun 1963-1965. Selain itu juga akan digambarkan tentang perkembangan kondisi sosial politik pasca peristiwa 1 Oktober 1965 hingga tahun 1966 dengan fokus pada proses pembersihan PKI dan cara masyarakat menyikapi PKI. Penulis melakukan beberapa tahapan penelitian yaitu memilih topik, mengumpulkan sumber baik lisan maupun tulisan, melakukan kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan kondisi sosial politik Kecamatan Banyumas pada kurun waktu 1963-1966 cukup stabil. Kemudian muncul organisasi politik yang berlatar belakang ideologi komunis dan nasionalis. Adanya kedua golongan membuat masyarakat terpecah. Kondisi ini berakhir setelah terjadinya peristiwa 1 Oktober 1965. Aksi pembersihan hanya membuat sedikit gejolak berupa kekerasan tanpa pembunuhan di Kejawar, serta intimidasi di Karangrau dan Papringan. Selain kejadian tersebut, mayoritas masyarakat Kecamatan Banyumas tetap tenang. Mereka tetap memperlakukan simpatisan PKI dengan normal karena adanya kepercayaan lokal yang membuat masyarakat Kecamatan Banyumas tidak bertindak negatif.

Kata kunci: *Kondisi sosial politik, komunis, nasionalis*

Abstract

This research focuses on the social conditions that include cultural and political conditions such as political organizations and their activities in 1963-1965. They are described on the development of social and political conditions after the events of October 1, 1965 up to 1966 with a focus on the cleaning process and people response regarding PKI. The author did some research steps which include choosing a topic, collecting both oral and written sources, performing source criticism, interpreting, and performing historiography. The results show that the political and social conditions in Banyumas District in the period of 1963-1966 was quite stable. Then, the political organizations that had communist background and nationalist ideology appeared. The existence of two groups make public split. This condition ends after the occurrence of the 1 October 1965 event. The cleaning action caused little chaos in the form of violence without killing at Kejawar, as well as intimidation at Karangrau and Papringan. In addition to these events, the majority of people in District of Banyumas remain calm. They still treat sympathizers of the PKI normally due to local beliefs that does not allow the people in the District of Banyumas performing negative actions.

Keywords: *Social and political condition, communist, nationalist*

PENDAHULUAN

Selama ini kajian seputar Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965 masih berkuat pada permasalahan siapa dalang dari penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat. Lebih dari itu, beberapa peneliti menggeser pembahasan ke ranah pembantaian dan gejolak sosial masyarakat pasca 1 Oktober 1965. Penelusuran jumlah korban, identifikasi pelaku maupun korban, proses pembantaian, dan daerah-daerah yang menjadi ladang pembantaian masih menjadi topik utama pembahasan ini. Akhirnya penelusuran sejarah mengenai gejolak sosial tahun 1965-1966 hanya berkuta di daerah-daerah dengan intensitas pembunuhan dan embantaian yang cukup tinggi seperti Klaten, Solo, Jombang, dan Kediri.

Fokus penelitian pada pembantaian dan gejolak sosial tahun 1965-1966 seperti melupakan daerah-daerah dengan korban pembantaian yang tidak signifikan. Daerah-daerah ini seperti kurang menarik dan hilang dari percaturan sejarah tahun 1965-1966. Padahal sudah menjadi hal yang umum jika terjadi gejolak di tingkat nasional maka akan berdampak pula pada kondisi sosial politik di daerah. Kemudian, akan seperti apa kejadian di daerah tergantung dengan masyarakat kondisi masyarakat di daerah tersebut. Misalnya saja di daerah Kediri. Kisruh politik tahun 1965-1966 berubah menjadi momen pembalasan para santri terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah bertindak represif dalam peristiwa Kanigoro pada awal tahun 1965.

Gejolak sosial pada tahun 1965-1966 juga terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Gejolak sosial yang terjadi berupa maraknya aksi teror dan pembunuhan. Aksi-aksi teror yang terjadi biasanya berupa pembakaran-pembakaran rumah, dan penjarahan. Aksi ini hampir menyebar ke seluruh wilayah Kabupaten Banyumas dengan Kecamatan Kebasen sebagai yang terparah. Sementara itu, gejolak sosial berupa aksi pembunuhan dan main hakim sendiri terjadi sepanjang wilayah Kabupaten Banyumas bagian barat yang meliputi Kebasen, Rawalo, Jatilawang, Wangon, hingga

Lumbir. Aksi pembunuhan ini memunculkan nama Sungai Serayu sebagai salah satu lokasi pembantaian.

Kecamatan Banyumas merupakan sebuah antitesis dari aksi pembunuhan dan teror yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 1965-1966. Walaupun wilayah Kecamatan Banyumas berbatasan langsung dengan Kebasen, namun secara umum kondisi sosial politik pada tahun 1965-1966 sangat berbeda. Aksi pembakaran rumah, main hakim sendiri, dan pembunuhan tidak terjadi di sini. Tentunya ini sangatlah unik karena jika dilihat dari *efek domino* yang timbul seharusnya Kecamatan Banyumas mengalami kejadian yang sama dengan Kecamatan Kebasen.

Keunikan inilah yang kemudian membuat penulis ingin meneliti tentang Kecamatan Banyumas pada sekitar peristiwa 1 Oktober 1965. Penulis ingin mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Kecamatan Banyumas sehingga tidak terkena *efek domino* dari kejadian-kejadian di Kebasen. Caranya yaitu dengan mempelajari struktur sosial dan faktor-faktor kebudayaan yang ada di Kecamatan Banyumas. Kedua hal ini nantinya akan dikaitkan dengan kondisi sosial politik sebelum terjadinya peristiwa 1 Oktober 1965. Hal ini dilakukan karena biasanya gejolak-gejolak sosial masyarakat yang terjadi pasca peristiwa 1 Oktober 1965 sangat dipengaruhi oleh fenomena-fenomena sosial yang terjadi sebelumnya seperti di Kediri.

Agar penelitian tidak melebar dalam waktu maka harus memiliki batasan. Batasan waktu yang diambil adalah tahun 1963 hingga tahun 1966. Tahun 1963 dipilih karena tahun ini adalah tahun digelorakannya kembali semangat revolusi anti kolonialisme dan imperialisme setelah kembalinya Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semangat ini digelorakan melalui pidato Soekarno yang berjudul "Genta Suara Revolusi" pada tanggal 17 Agustus 1965. Sementara itu, tahun 1966 dipilih karena pada tahun ini aksi pembasmian terhadap PKI di Kecamatan Banyumas telah selesai. Bahkan pada pertengahan tahun 1966 beberapa tahanan politik sudah mulai dibebaskan.

Secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa penelitian dengan judul *Kondisi Sosial Politik Banyumas sekitar Peristiwa 1 Oktober 1965 (1963-1966)* akan membahas empat permasalahan utama yaitu (1) gambaran umum Kecamatan Banyumas pada dasawarsa 60-an, (2) kondisi sosial politik Kecamatan Banyumas sebelum terjadinya peristiwa 1 Oktober 1965 (1963-1965), (3) kondisi sosial politik Kecamatan Banyumas pada saat peristiwa 1 Oktober 1965, dan (4) kondisi sosial politik Kecamatan Banyumas saat terjadi aksi pembersihan PKI tahun 1965-1966.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode ini oleh Kuntowijoyo (2003; 1999) dibagi menjadi lima tahap yaitu (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi atau kritik sumber, (4) interpretasi, dan (5) historiografi. Tahapan-tahapan ini harus runtut dan tidak boleh saling tukar posisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Banyumas
Kecamatan Banyumas adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan ini berjarak ± 20 km arah tenggara Kota Purwokerto, Ibukota Kabupaten Banyumas. Terdapat empat kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Banyumas yaitu Kebasen di sebelah barat, Somagede di sebelah timur, Kemranjen di sebelah selatan dan Kalibagor di sebelah utara. Banyumas memiliki luas 38,90 km² dengan 12 desanya. Desa-desanya tersebut yaitu Sudagaran, Kedunguter, Pakunden, Kalisube, Papringan, Danaraja, Kejawar, Karangraou, Kedunggede, Pasinggangan, Dawuhan, dan Binangun. Desa terluas adalah Pasinggangan dengan luas wilayah sebesar 8,55 Ha. Sedangkan untuk yang tersempit adalah Danaraja dengan luas wilayah 0,76 Ha (BPS, 2014).

Kecamatan Banyumas pada sekitar dasawarsa ke-60 merupakan sebuah kota kecamatan dengan kepadatan penduduk yang cukup rendah. Menurut sensus pada tahun

1961 jumlah penduduk kecamatan ini hanyalah 32.324 jiwa dengan rincian 15.729 laki-laki dan 16.539 jiwa perempuan. Jumlah penduduk sebanyak ini merupakan jumlah penduduk yang sangat wajar jika dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Banyumas (Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan dan BPS, 1980)

Penduduk Kecamatan Banyumas terdiri dari dua etnis yaitu Jawa dan Tionghoa. Mereka tersebar ke dalam berbagai profesi dan mata pencaharian. Petani menjadi mata pencaharian yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat Kecamatan Banyumas. Hal ini terjadi karena sebagian besar desa yang ada di Kecamatan Banyumas memiliki sawah. Selain petani, penduduk Kecamatan Banyumas menekuni beberapa pekerjaan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), pengusaha, serta pedagang.

Penduduk Kecamatan Banyumas merupakan bagian dari Kebudayaan Banyumas. Mereka menggunakan bahasa Ngapak sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa ini adalah bahasa yang berarti apa adanya. Jika berkata "sega" maka bunyinya juga "sega", bukan seperti orang Solo atau Jogja yang menyebutnya dengan "sego". Ciri khas bahasa ini yaitu jika berkata terkesan terburu-buru, dan terkesan seperti orang yang sedang marah-marah. Selain itu, bahasa Ngapak juga merupakan bahasa yang egaliter karena tidak mengenal kasta dan tingkatan dalam tata bahasanya.

Masyarakat Banyumas merupakan masyarakat yang terbuka. Akan tetapi keterbukaan ini tidak berarti mereka berkembang tanpa norma dan nilai lokal. Mereka selalu berpegang teguh pada aturan dan kepercayaan yang ada sejak nenek moyang mereka. Salah satu yang paling kuat adalah kepercayaan bahwa bumi atau tanah Banyumas tidak boleh dikotori dengan tindakan negatif. Tanah Banyumas harus dijaga karena kelak suatu saat akan berguna bagi banyak orang. Selain itu mereka juga tidak mau mengusik leluhur yang dipercaya masih mendiami Banyumas. Apabila mereka bertindak negatif maka akan mendapat karma. Akhirnya ke-

percayaan dan keyakinan ini membuat masyarakat Banyumas memiliki karakter cinta damai dan tidak suka kekerasan.

Selain karakter cinta damai dan tidak suka kekerasan, masyarakat Banyumas juga memiliki karakter lain. Karakter pertama yaitu egaliter. Karakter ini mungkin adalah pembentuk utama bahasa Ngapak. Kemudian, ada karakter lain seperti bertanggung jawab, pekerja keras, bebas, suka mengalah, dan vulgar yang mempengaruhi perilaku masyarakat Banyumas dalam kehidupan sehari-hari. Satu karakter lagi yaitu afirmatif dan kritis. Karakter ini lebih ke pola pikir masyarakat terhadap pemerintah dan birokrasi. Ada kalanya mereka sangat mendukung dan patuh, namun juga tidak segan untuk mengkritisi (Priyadi, 2003).

Seperti masyarakat kebudayaan lain, masyarakat Banyumas juga memiliki tradisi dan kesenian. Tradisi yang paling khas di Banyumas adalah *Begalan*. Tradisi ini adalah sebuah sandiwara yang fungsinya seperti ruwatan bagi calon pengantin (Filosuf, 2014). Selain itu, secara umum tradisi di Banyumas hampir seperti tradisi Jawa pada umumnya. Misalkan saja ada *Nyadran*, *Sedekah Bumi*, *Mitoni*, *Mim-iti*, *Sambatan*, dan *Cowongan*. Hanya saja untuk *nyadran* dan *sedekah bumi* di Banyumas waktu dan bentuknya tidak sama dengan di Jogja dan Solo. *Nyadran* dilakukan pada bulan Ruwah atau Syaban berupa kenduri di setiap rumah. Sedangkan *Sedekah Bumi* dilakukan pada bulan Muharam atau Sura berupa upacara bersih desa dan ruwatan.

Pada bidang kesenian, Banyumas memiliki beberapa yang khas. Dikatakan khas dan berbeda karena kebanyakan merupakan perpaduan antara Jawa dan Sunda. Kesenian-kesenian itu antara lain yaitu *Lengger*, *Ebeg*, dan *Calung Banyumasan*. *Calung Banyumasan* merupakan bentuk permainan musik yang alat musiknya terbuat dari bilahan-bilahan bambu. Permainan music ini biasanya memainkan lagu-lagu khas Banyumas seperti *Eling-eling Banyumasan*, *Gunung Sari*, *Ricik-ricik*, dan *Bendrong Kulon*. Bentuk lebih kompleks dari *calung banyumasan* adalah *Lengger* dan *Ebeg*. *Lengger* merupakan tari-tarian seperti tari gambyong namun diiringi

oleh *calung banyumasan*. Dahulu penari *lengger* adalah laki-laki, namun sekarang berganti perempuan sehingga *lengger* sering identik dengan ronggeng. *Ebeg* adalah bentuk Banyumasan dari Kuda Lumping. Bedanya yaitu pada musik pengiringnya. *Ebeg* diiringi musik khas Banyumas yaitu *calung banyumasan*.

Keadaan Sosial Politik Kecamatan Banyumas Sebelum Peristiwa 1 Oktober 1965

Tahun 1960-an Kecamatan Banyumas terbagi ke dalam 12 desa. Desa-desa ini terdiri dari 2-3 dusun. Setiap dusun berisi sekitar 1-2 Rukun Kampung (RK) yang masing-masing memiliki 5-7 Rukun Tetangga (RT). Pembagian ini tergantung dengan luas dan jumlah penduduk desa. Semakin luas dan banyak penduduk sebuah desa, maka jumlah RT, RK, dan dusun di desa tersebut juga semakin banyak.

Tata kelola pemerintahan di desa sering disebut dengan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Juru Uang, Kayim, Kepala Dusun, Kebayan, dan Polisi Desa. Kepala Desa sering disebut dengan Lurah atau *Penatus*. Dia adalah kepala pemerintahan di desa yang dipilih melalui pemilihan umum desa. Sekretaris Desa atau Carik adalah orang nomer dua di struktur pemerintahan desa. Fungsinya yaitu sebagai juru tulis dan kepala administrasi di desa. Juru Uang merupakan penanggung jawab keuangan desa. Biasanya dia lebih banyak mengurus iuran-iuran dari masyarakat dan mengalokasikannya. Kayim adalah kepala urusan agama di desa. Biasanya Kayim atau juga disebut Lebe adalah sesepuh desa yang memiliki pengetahuan agama yang mumpuni. Dia juga yang mengurus prosesi pemakaman dan beberapa upacara adat. Kepala dusun sering juga Bau. Setiap desa memiliki kepala dusun lebih dari satu. Hal ini tergantung jumlah dusun dalam setiap desa. Kebayan yaitu pesuruh desa. Tugasnya yaitu membantu segala urusan pemerintahan desa seperti mengantar surat dan menjadi penghubung antar perangkat desa. Sedangkan Polisi Desa adalah penggerak masyarakat di desa. Jadi ketika akan ada kegiatan yang meli-

batkan massa cukup besar, maka polisi desa yang mengajak dan mengerahkan masyarakat untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Jumlah polisi desa di tiap desa bisa lebih dari satu sesuai jumlah dusun yang ada.

Masa jabatan perangkat desa tidak menentu. Umumnya mereka menjabat hingga merasa tidak sanggup dan meletakkan jabatannya. Jika tidak meletakkan jabatan maka perangkat desa boleh menjabat seumur hidup dan baru diganti setelah dia meninggal. Proses penggantian dilakukan dengan pemilihan atau penunjukan. Lurah adalah satu-satunya perangkat desa yang dipilih melalui pemilihan langsung. Perangkat desa selain lurah biasanya hanya dipilih melalui musyawarah dengan memperhatikan faktor pendidikan dan pengalaman dari tiap calonnya.

Perangkat desa mendapat upah berupa tanah. Upah tanah ini sering disebut dengan *bengkok*. Tanah *bengkok* dimiliki tiap desa berbeda satu sama lain. Ada desa yang hanya memiliki 3 Ha, dan ada yang mencapai 6 Ha. Jumlah *bengkok* sebanyak itu di bagi untuk semua perangkat desa dengan ukuran berbeda-beda. Bagian paling luas diterima oleh Lurah. Kemudian di nomer dua yaitu Carik. Setelah itu berturut-turut Juru Uang, Bau, Kayim, dan Polisi Desa.

Pada sektor pendidikan, tahun 1960-an Kecamatan Banyumas cukup memadai. Hal ini terlihat dari ketersediaan sarana pendidikannya. Pada kategori pendidikan dasar, setiap desa telah memiliki Sekolah Rakyat (SR) walaupun di beberapa tempat pelaksanaannya menumpang rumah-rumah penduduk. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Teknik (ST) tersedia di kota kecamatan dengan komposisi 1 buah SMP Negeri dan 2 buah ST Negeri. Sementara itu, dari agama Kristen juga membuka sebuah SR dan sebuah SMP. SR Kristen terletak di selatan pasar Banyumas. Sedangkan SMP Kristen berada di jalan Onderan.

Ketersediaan sekolah yang cukup merata juga ditunjang dengan komposisi guru yang cukup kompeten pada saat itu. Jumlah total guru di Kecamatan Banyumas pada saat itu sudah mencapai sekitar 200 orang. Jumlah

ini merupakan akumulasi dari sekitar 120-an guru SR, dan sekitar 80-an sekolah lanjutan. Rata-rata mereka adalah lulusan sekolah keguruan seperti Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Sekolah Guru Bantu (SGB), Sekolah Guru Atas (SGA), dan Sekolah Guru Olahraga (SGO).

Secara umum, Kecamatan Banyumas terbagi menjadi 3 golongan. Pembagian ini berdasarkan tingkatan ekonomi. Golongan pertama yaitu golongan atas. Golongan ini ditempati oleh pengusaha, pedagang besar, pegawai tinggi instansi pemerintah, dan petani kaya. Golongan kedua yaitu golongan menengah. Pegawai rendah instansi pemerintah, pedagang kecil, perangkat desa, petani sedang, dan guru menjadi bagian dalam golongan ini. Sedangkan golongan terakhir yaitu golongan rendah diisi oleh para buruh tani, buruh perkebunan, buruh industri batik, dan petani miskin.

Pembagian masyarakat dalam tiga golongan menjadi atas, menengah, dan rendah secara tidak langsung juga mempengaruhi sistem sosial di masyarakat. Masyarakat cenderung menempatkan golongan atas dan golongan menengah sebagai pemimpin-pemimpin organisasi-organisasi politik maupun masyarakat. Misalkan saja Partai Nasionalis Indonesia (PNI) parta ini diketuai oleh Parwoto, seorang pengusaha konveksi. Kemudian dalam tubuh lawan politiknya yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) juga terjadi hal yang sama. Partai ini di pimpin oleh seorang kepala sekolah bernama Hadi Siswoyo alias Hadi Kasim. Sementara itu, Ketua-ketua organisasi kepemudaan juga rata-rata seorang guru.

Organisasi Politik di Kecamatan Banyumas

Masyarakat Kecamatan Banyumas pada tahun 1963-1966 terbagi kedalam dua partai politik besar. Partai politik tersebut adalah PNI dan PKI. PNI di Kecamatan Banyumas dipimpin oleh Parwoto. Dia menggunakan rumah pribadinya di sebelah barat pasar Banyumas untuk dijadikan kantor partai dan organisasi sayap kepemudaan partai yaitu

Gerakan Pemuda Marhaen (GPM). Saat berada di bawah kepemimpinannya, PNI dan GPM menjadi yang terbesar di Kecamatan Banyumas. Simpatisan PNI tersebar hampir merata di semua desa kecuali Karangraou. Jika dipresentasikan, jumlah simpatisan PNI tiap desa selain Desa Karangraou bisa mencapai angka 90%.

Berbanding terbalik dengan PNI, PKI merupakan partai dengan simpatisan yang tidak terlalu banyak. Partai ini bisa dikatakan menjadi partai minoritas di tiap desa. Satu-satunya desa dengan jumlah simpatisan terbanyak adalah Karangraou. Hampir semua masyarakat di desa ini adalah simpatisan PKI. Kemungkinan besar fenomena ini ada kaitannya dengan keberadaan figur Hadi Siswoyo sebagai Ketua Komite Sub Seksi (CSS) PKI Banyumas yang tinggal di Karangraou. Hadi Siswoyo yang cukup kharismatik dan cerdas membuat warga Karangraou juga tertarik untuk mengikuti partai politiknya.

Aktivitas Politik

Aktivitas politik di Kecamatan Banyumas banyak diisi oleh persaingan antar PNI dan PKI. Persaingan ini terjadi karena kedua partai saling menyebarkan ideologinya. Praktisnya yaitu kedua partai melakukan berbagai cara untuk memperoleh banyak simpatisan. Cara-cara yang digunakan antara lain yaitu kampanye terbuka, kegiatan sosial, dan infiltrasi.

Kampanye terbuka biasanya dilakukan dengan memasang pamflet, dan rapat-rapat umum di desa-desa. Sebagai eksekutor pemasangan pamflet adalah organisasi sayap kepemudaan partai yaitu GPM di kubu PNI dan Pemuda Rakyat (PR) di kubu PKI. Mereka memasang pamflet di pohon yang berada di pinggir jalan.

Rapat umum dilakukan di desa-desa secara bergantian dengan intensitas bulanan atau bahkan mingguan. Sebelum diadakan rapat umum, biasanya kader partai melakukan pengumuman yang berisi ajakan untuk mengikuti rapat tersebut. Setelah massa terkumpul rapat diisi dengan orasi oleh tokoh-tokoh partai. Seruan semangat revolusi, permasalahan-permasalahan nasional, dan

program-program partai menjadi materi-materi dalam orasi. Rapat umum kemudian ditutup dengan ajakan bergabung dan pendataan simpatisan. Cara yang kedua untuk mengambil hati masyarakat adalah dengan ikut aktif dalam kegiatan sosial. Organisasi kepemudaan kembali menjadi ujung tombak. Mereka berusaha mengerahkan tenaga-tenaga sebanyak mungkin dalam kerja bakti maupun ronda. Ada rasa tidak mau kalah dalam masing-masing organisasi kepemudaan. Keduanya menganggap organisasinya sebagai yang terbaik dan paling peduli dengan masyarakat. Walaupun demikian, beberapa kali mereka juga bekerja sama untuk membantu warga. Sebagai contoh adalah ketika membantu sebuah keluarga yang rumahnya terkena longsor di Karangraou.

Infiltrasi atau kampanye terselubung adalah yang paling massif dilakukan oleh partai-partai. Mereka berusaha masuk ke semua elemen masyarakat. Caranya yaitu dengan membuat wadah-wadah organisasi bagi kalangan-kalangan tertentu dan membuat organisasi tandingan apabila dalam kalangan tersebut telah memiliki induk organisasi. Sebagai contoh cara pertama yaitu pembentukan Barisan Tani Indonesia (BTI). Walaupun secara struktural BTI tidak terkait dengan PKI, namun organisasi ini dianggap sebagai cara PKI untuk merekrut kaum tani. Anggapan ini sebenarnya tidak salah karena tokoh-tokoh BTI kebanyakan adalah kader PKI. Bahkan ketua BTI Kecamatan Banyumas juga seorang kader PKI.

Pembentukan organisasi tandingan yang paling terlihat di Kecamatan Banyumas terjadi pada kalangan guru. Awalnya, telah ada organisasi induk guru yang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Akan tetapi, sekitar tahun 1963 diadakan rapat besar guru seluruh Kecamatan Banyumas yang kemudian memunculkan organisasi guru baru yang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia Non Vaksentral (PGRINV). Akhirnya dalam tubuh persatuan guru terjadi perpecahan. Satu pihak tetap bertahan dengan PGRI lama atau yang disebut dengan PGRI Subiadinata, sedangkan satu pihak lain mendirikan PGRINV. Keduanya berusaha

mencari pengaruh sebesar-besarnya di kalangan guru.

Keadaan Sosial Politik Kecamatan Banyumas Saat Terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 dan Setelahnnya

1. Gestapu dan Gejolak Sosial Politik di Daerah

Gerakan September Tigapuluh (Gestapu) mengacu pada sebuah operasi yang dilakukan oleh sekelompok tentara pada pagi hari 1 Oktober 1965. Operasi ini bertujuan awal untuk menculik beberapa jenderal angkatan darat (AD) yang dianggap kaum *kontra revolusi* dan *kapitalis birokrat* agar mau menandatangani sebuah surat pernyataan. Surat pernyataan ini berkaitan dengan adanya isu dewan jenderal yang akan melakukan tindakan makar terhadap Presiden Soekarno. Akan tetapi, tujuan awal untuk hanya menculik para jenderal ternyata gagal. Akhirnya jenderal-jenderal yang telah diculik dibunuh di Lubang Buaya, Jakarta Timur (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994)

Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai tindakan makar dan menyeret PKI ke dalamnya. Dugaan keterkaitan PKI muncul karena beberapa tokohnya berada di lingkungan lokasi pembunuhan pada sebelum dan saat terjadi pembunuhan. Akhirnya dugaan ini menjadi alasan bagi Soeharto dan AD untuk melakukan pelarangan terhadap PKI. Aksi pelarang kemudian ditindaklanjuti dengan aksi pembasmian terhadap simpatisan PKI di daerah-daerah.

Aksi pembersihan terhadap PKI menyebabkan gejolak sosial di masyarakat. Gejolak sosial ini terjadi lantaran masyarakat secara umum terpecah menjadi dua golongan. Golongan pertama yaitu golongan PKI. Mereka yang menjadi bagian dari golongan ini adalah semua anggota PKI dan ormas-ormasnya (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994). Sedangkan golongan kedua yaitu golongan Non-PKI. Golongan ini terdiri dari gabungan partai dan ormas yang berhaluan nasionalis dan agamis. PNI dan NU menjadi bagian terbesar dalam golongan ini.

Perpecahan yang terjadi dalam masyarakat ini berlanjut dengan adanya tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh golongan Non-PKI terhadap golongan PKI. Tindakan represif ini antara lain berbentuk penangkapan, pembunuhan dan perusakan.

2. Masyarakat Kecamatan Banyumas Menyikapi Gestapu

Berita tentang Gestapu masuk ke Kecamatan Banyumas pada tanggal 1 Oktober 1965 melalui radio. Akan tetapi berita ini hanya terbatas ke beberapa orang seperti para tokoh partai politik dan organisasi masyarakat. secara umum masyarakat mengetahui berita ini beberapa hari setelah 1 Oktober 1965 melalui desas-desus. Bahkan ada yang baru tahu adanya Gestapu saat mulai diadakannya pencidukan terhadap simpatisan PKI.

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Banyumas juga tidak mengerti tentang Gerakan 30 September. Mereka mengetahui peristiwa 1 Oktober 1965 sebatas terjadinya pembunuhan para jenderal. Hal-hal mengenai seruan Untung dan siapa dibalik Peristiwa 1 Oktober tidak begitu mereka gubris. Kemudian mereka menyikapi Gerakan 30 September dengan meningkatkan kewaspadaan dan saling menjaga keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Organisasi-organisasi masyarakat maupun politik juga saling menahan diri dalam menyikapi desas-desus yang muncul pada saat itu sehingga tidak terjadi konflik fisik.

3. Aksi Pembersihan PKI dan Perkembangan Kondisi Sosial Politik

Aksi pembersihan simpatisan PKI di Kecamatan Banyumas dimulai kira-kira pada pertengahan bulan Oktober 1965. Target operasi pembersihan PKI adalah semua simpatisan PKI baik itu yang memang benar-benar PKI atau hanya menjadi anggota salah satu organisasi macam BTI, PR, PGRI NV, Lekra, Gerwani, dan SOBSI. Namun dari sekian banyak anggota organisasi yang ikut ditangkap, PGRI NV, BTI, dan PR merupakan yang paling banyak. Hal ini disebabkan karena organisasi-organisasi ini merupakan organ-

isasi dengan jumlah simpatisan terbesar di Kecamatan Banyumas. Bahkan untuk desa Karangrau, hampir semua pemuda ditangkap karena menjadi anggota PR.

Aksi pembersihan cenderung lebih banyak melibatkan masyarakat umum tanpa berafiliasi pada kekuatan politik tertentu. Mereka dengan sukarela secara perorangan membantu tentara sebagai pelaksana penangkapan. Ada yang menjadi penunjuk jalan, ada pula yang menunjukkan siapa-siapa saja yang dianggap sebagai PKI. Keterlibatan masyarakat umum non politik membuat pola-pola pembersihan lebih beragam. Dendam dan rivalitas politik yang biasanya mewarnai aksi pembersihan berganti dengan perkara-perkara pribadi yang rumit. Perkara-perkara tersebut misalnya seperti hutang-piutang, perebutan jabatan, dan permasalahan asmara. Kadang hanya karena ingin mendapat jabatan yang lebih tinggi kemudian menjatuhkan pemegang jabatan tersebut dengan cara menuduhnya terlibat PKI.

Secara umum pembersihan PKI di Kecamatan Banyumas tidak disertai dengan aksi pembunuhan dan pembantaian. Akan tetapi, seperti daerah-daerah lain, Kecamatan Banyumas juga mengalami masa penuh intimidasi dan kekerasan. Aksi ini menyeret beberapa oknum masyarakat dan militer sebagai pelakunya. Tercatat ada 1 kasus kekerasan dan 3 kasus teror. Kasus kekerasan terjadi di desa Kejawa. Kasus ini dilakukan oleh oknum kepala desa beserta kronikroninya terhadap golongan Komunis yang belum ditangkap. Sedangkan 3 kasus teror terjadi di Papringan, Karangrau, dan Kejawa. Kasus di Papringan hanya berupa ancaman dan teror lisan. Sedangkan yang terjadi di Karangrau dan Kejawa berupa pembakaran sebuah rumah.

SIMPULAN

Tindakan masyarakat yang tetap menjaga kestabilan dengan tidak bertindak negatif selama kurun waktu 1963-1966 sepertinya dipengaruhi kepercayaan yang berkembang di Kecamatan Banyumas. Kepercayaan bahwa tanah Banyumas tidak boleh untuk kegiatan negatif terutama untuk pertumpahan darah

telah membentuk karakter masyarakat yang tidak suka kekerasan, dan lebih cinta damai. Karakter inilah yang mungkin muncul dalam aktivitas sosial politik masyarakat baik sebelum peristiwa 1 Oktober 1965 hingga aksi pembersihan pasca terjadinya peristiwa 1 Oktober 1965.

Aksi kekerasan yang terjadi di Kejawa terjadi karena ada instruksi dari Kepala Desa setempat. Sesuai konsep kekuasaan, Kepala Desa sebagai penguasa di desa memiliki dominasi dan pengaruh pada masyarakat desa. Dominasi dan pengaruh inilah yang akhirnya digunakan untuk menggerakkan masyarakat untuk menindak orang-orang PKI. Padahal instruksi yang dilakukan bukanlah berdasarkan kepentingan bersama. Instruksi ini lebih condong berdasarkan kepentingan pribadi dari kepala desa itu sendiri untuk menghilangkan lawan-lawan politiknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dewan redaksi Jurnal Socia atas kesempatan yang diberikan sehingga paper ini dapat diterbitkan pada Jurnal Socia edisi September 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Banyumas. 2014 *Statistik Daerah Kecamatan Banyumas 2014*. Banyumas: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas.
- Filosuf, R.R. 2014. Eksistensi Kesenian Tradisional Begalan dalam Perkawinan Masyarakat Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Kuntowijoyo. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Priyadi, S. 2003. Beberapa Karakter Orang Banyumas. *Bahasa dan Seni Tahun 31 Nomor 1*.
- Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM dan BPS. 1980. *Sensus Penduduk*

Tahun 1961. Penduduk Desa Jawa. Buku II: Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta. Seri Laporan No. 23. Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM dan BPS.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1994. *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya.* Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.